

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengalaman sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa Projo lebih berfungsi sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan daripada menjadi kekuatan masyarakat sipil yang independen. Hal ini dimungkinkan akibat Projo yang justru terjebak dalam loyalitas personal yang terbentuk dari *political idolatry* terhadap Jokowi. Pertama, lewat dimensi *self-coronation* atau *self-divinization*, di mana Projo menampakkan karakter yang menempatkan nilai tertinggi pada figur politik atau ideologi tertentu, yang kemudian menjadi narasi besar serta menjadi objek dari loyalitas tersebut. Hal itu tampak dimulai dari orientasi pendiriannya, populisme Jokowi serta memenangkan Jokowi sebagai presiden (slogan “Jokowi For President”) hingga pengukuhan Projo sebagai ormas berbadan hukum yang mendukung Jokowi. Arah dari implikasi dimensi ini adalah juga terbentuk karakter Projo yang berfungsi menjadi alat konsolidasi kekuasaan dan dinasti politik Jokowi, bukan sebagai penguatan masyarakat sipil.

Kedua, lewat praktik *quasi-totalitarianism* dalam artian Projo menciptakan budaya organisasi dengan praktik liturgis yang sangat kuat sehingga mengalahkan loyalitas lainnya, atau mirip dengan loyalitas umat beragama. Budaya ini diperkuat oleh hubungan politik transaksional yang membuat Projo mendukung kebijakan Jokowi tanpa kritik, termasuk ekspansi kekuasaan eksekutif yang berpotensi merusak demokrasi, alih-alih menjadi kelompok relawan yang mengawal pemerintahan Jokowi sebagaimana ikrarnya. Selain itu, dukungan Projo terhadap kebijakan kontroversial Jokowi serta pembiaran terhadap erosi demokrasi pada Pemilu 2024 mencerminkan bagaimana Projo ini telah kehilangan independensinya sebagai pengawas pemerintahan.

Ketiga, lewat praktik *social oppression* serta *violation of human dignity* yang ini dapat dideteksi melalui konsekuensi destruktifnya. Misalnya, tingkah laku tersebut tercermin dari intoleransi terhadap perbedaan pandangan dan perlindungan kebebasan individu. Projo mendukung praktik kriminalisasi terhadap lawan politik

dan aktivis yang mengkritik Jokowi, memperlihatkan penolakan terhadap kebenaran dan fakta. Kritik terhadap Jokowi dianggap ancaman yang harus dilawan demi menjaga citra yang telah dikonstruksi sedemikian rupa—suatu tendensi yang merusak *civic culture* dalam demokrasi.

Menimbang karakter *political idolatry* tersebut, maka penulis berargumen bahwa fungsi relawan Projo dalam kontekstualisasi masyarakat sipil juga sudah tercemar. Menggunakan konsepsi prinsip yang diajukan oleh Synder dan Omoto (2008) bahwa *volunteerism* mendasarkan pada kesukarelaan dengan motif memenangkan kepentingan dirinya yang sedang diperjuangkan oleh ide tertentu atau oleh pihak lain, dan Wilson (2007) yang mengartikan *volunteerism* sebagai kerja advokasi yang dilakukan oleh masyarakat marjinal dalam mengajudikasi kepentingan mereka terhadap negara, sehingga keduanya meletakkan institusionalisasi gerakan masyarakat akar rumput sebagai cara untuk menjalankan transformasi kepentingan yang diharapkan tersebut. Dalam hal ini kepentingan yang awalnya diutarakan adalah mendukung perubahan politik dan hukum ke arah demokrasi serta meningkatkan kesejahteraan melalui dukungan kepada Jokowi.

Dengan penjabaran bingkai aktivitas yang dilakukan Projo selama satu dekade ini, yang tampak kemudian adalah partisipasi tersebut bukanlah pada penguatan terhadap demokrasi dan sistem politik-hukum yang ada, ataupun pada transformasi masyarakat, namun justru pada penguatan Presiden sebagai individunya. Hal ini oleh karena disebabkan dari karakter *political idolatry* yang telah diidentifikasi, yang mana penulis berargumen bahwa peran dan fungsi relawan Projo dalam konteks masyarakat sipil telah tercemar oleh kecenderungan loyalitas terhadap Jokowi. Partisipasi politik Projo lebih diarahkan untuk memperkuat posisi dan citra Jokowi sebagai individu. Aktivitas Projo yang dimulai dari kampanye, upaya berulang memoles citra Jokowi, mendukung kebijakan kontroversial tanpa kritik, hingga pembelaan terhadap politik dinasti melalui pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres, mengindikasikan bagaimana relawan Projo lebih banyak berperan sebagai alat legitimasi kekuasaan Jokowi daripada sebagai pengawas independen sebagaimana yang pernah diharapkan pada kelompok masyarakat sipil. Projo dengan karakter *political idolatry*-nya, telah kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi pengontrol dan penyeimbang.

Terakhir, dari tinjauan di atas, barangkali satu hal yang kemudian perlu diberikan perhatian khusus adalah fakta bahwa Projo, bagian dari kebangkitan masyarakat sipil, justru memperkuat arus kemunduran demokrasi yang dilakukan oleh dari atas atau oleh elite. Keberlanjutan fenomena ini akan semakin memperlemah daya tahan demokrasi Indonesia terhadap ancaman otoritarianisme. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi masyarakat sipil secara murni bergerak sebagai pengawas menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan dua jenis saran yaitu saran praktis dan teoritis.

5.2.1. Saran Praktis

- a. Perlu ada upaya untuk mengembalikan fungsi masyarakat sipil sebagai pengawas independen pemerintah, serta merefleksikan kembali perannya, agar tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi. Edukasi politik berbasis nilai-nilai demokrasi yang kritis harus digalakkan agar relawan tidak terjebak dalam pengkultusan yang membahayakan.
- b. Pengambil kebijakan serta masyarakat perlu mempertimbangkan regulasi yang lebih jelas mengenai peran dan batasan relawan politik—atau kembali membedakan batasan jelas antara simpatisan, tim pemenangan, maupun yang secara murni relawan. Hal ini dapat diadopsi dalam aturan teknis dari lembaga penyelenggara pemilu, dalam Peraturan KPU (PKPU). Selain itu, penguatan aspek transparansi dan pendedepanan akuntabilitas, terutama bahwa relawan umum menerima bantuan dana atau jasa dari publik.

5.2.2. Saran Teoritis

- a. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis fenomena relawan politik melalui pendekatan populisme,

untuk memahami pola interaksi antara elite dan basis massa.

- b. Studi selanjutnya dapat memperluas analisis dengan membandingkan fenomena serupa di negara lain.